

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alfian. (1974). Format Baru Politik Indonesia. In Alfian, *Indonesia Magazine*. Jakarta: Yayasan Harapan Kita.
- Asmara, G. (2005). *Ombusman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit LaksBang Pressindo.
- Attamimi, A. (1992). Teori Perundang-undangan Indonesia. *Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI Jakarta*.
- Azhari, M. (1992). *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bangun, Z. (2007). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Medan: Bina Media Perintis.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (1982). Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan. *Prisma, Nomor 07*.
- Dahl, R. (2001). *Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadjar, M. (2004). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. *makalah diskusi terbatas KRHN*,.
- Fajar, M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Friedrick, C. (1967). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Praticce in Europe and America (5th edition: Weldham, Mass: Blaisdell Publising Company, dalam Miriam*. .
- Hatta, M. (1987). *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung.
- Held, D. (2004). *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Huda, N. (2007). *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Huntington, S. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- Huntington, S. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Grafiti.
- Idjehar, M. (2003). *HAM versus Kapitalisme*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kusnardi, M. I. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PSHTN-FHUI.
- Magnis, F. S. (1994). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. (2003). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Marbun, S. (1997). Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Melfa, W. (2013). *PEMILUKADA (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*. Bandar Lampung: BE Press.
- Noer, D. (1983). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Nurtjahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prihatmoko, J. (2008). *men Demokratis kan PEMILU Dari Sistem Sampai elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, M. (1986). *Demokrasi dan Proses Politik*.
- Ridwan, H. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosidin, U. (2010). *OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI (dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-Perubahannya)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemantri, S. (1968). *Sistem Dua Partai*. Jakarta: Bina Tjipta.

Soemantri, S. (1986). Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945. *Alumni*.

Urosky, M. (n.d.). Prinsip-prinsip Demokrasi. *Office of International Information Program US*.

Wibisono, G. (1987). Rasialisme Vs Nasionalisme di ASEAN. *Kompas*, 4.

Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Baawaslu No. 06 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS pada Pemilukada.

Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2012 tentang Pewanasan Pemilukada.

Jurnal

Afrosin Arif, Membangun Model Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Format Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gabungan, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 1 Nomor 1 (2012).

Ansorullah, Reformasi Pilkada Langsung, Artikel, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Volume 3 Nomor 2 (November 2010).

Catur Wido Haruni, Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Humanity*, Volume 9 Nomor 1 (September 2013).

Cecep Effendi, Evaluasio Kritis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Artikel, *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2005).

Galuh Kartiko, Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 2 (2011).

Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 (2011).

Romli Mubarak, Peranan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi Pasca Reformasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10 Nomor 1 (Oktober 2012).

Susilo, Menyongsong Pilkada yang Demokratis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 (Juni 2005).

Suwarma Al Muchtar, Pemilu dan Pendidikan Demokrasi, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1 Nomor 18 (Oktober 2008).

Zainal Arifin Hoesein, Pemilukada Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 6 (Desember 2010).